

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Dewasa ini, perkembangan bisnis yang semakin modern menuntut perusahaan mulai berkompetisi dalam mempertahankan usahanya. Hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk fokus pada perbaikan dan peningkatan kondisi internal perusahaan atau dalam artian mencari *profit* saja namun juga perusahaan dituntut untuk fokus dalam mengembangkan hubungan sosial pada kondisi eksternal perusahaan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholders*. Tanggung jawab sosial baik eksternal maupun internal ini disebut dengan *Corporate Sosial Responsibility*. (Marissa, Dianne dan Rizky, 2013)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (dalam Solihin, 2009).

Corporate Sosial Responsibility (CSR) Disclosure atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial

ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (dalam Titan, 2012).

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *good corporate governance* (GCG), yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi. (Utama 2007 dalam Tita dan Wahdatul, 2012)

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa :”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana factor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Sementara itu, di dalam pasal 74 dinyatakan bahwa kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal no. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap

penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (UU PT.2007)

Saat ini tanggung jawab sosial masih belum tersosialisasikan dengan baik dengan dilatar belakangi masih menyimpan banyak polemik di kalangan departemen Hukum dan HAM dan rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktiva/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia . Faktanya masih banyak kasus yang berhubungan dengan CSR. Mulai dari Kawasan Industri Jababeka di Cikarang ada warga yang hidup penuh keterbatasan dan justru menanggung dampak negatif dari keberadaan Kawasan Industri besar dan pemukiman yang mewah. Industri seharusnya positif bagi warga sekitar tetapi ini malah sebaliknya, ada pengelolaan yang salah. Perusahaan di Kawasan Jababeka tidak maksimal menjalankan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) kepada warga. Bahkan ada yang mengalami dampak negatif, seperti banjir yang menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian bagi warga sekitar. Seharusnya dengan ribuan perusahaan yang berada di daerah tersebut, warga di daerah sekitar mendapatkan manfaat. Baik pembangunan sarana prasarana dan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan. (www.metrotvnews.com , diposting pada:12 januari 2015 pukul 00.28 WIB, diakses pada 14 Mei 2016 pukul 13.38 WIB)

Selain itu Peristiwa longsor yang menewaskan empat orang karyawan PT. Freeport menjadi petunjuk bahwa lingkungan di sekitar lokasi tambang sudah dalam keadaan kritis. Hal ini sekaligus membuktikan tidak adanya upaya CSR dari perusahaan terhadap alam yang dirusak oleh aktivitas pertambangan mereka

dan tidak memperhatikan para pekerja. Hampir semua pekerja yang berada di tempat kecelakaan masih berstatus dalam pelatihan. Ini jelas menyalahi prosedur ketenagakerjaan (www.republika.co.id , diposting pada:15 Mei 2015, diakses pada 16 Mei 2016 pukul 11.47 WIB).

Peristiwa Pembakaran hutan di Kalimantan, Indonesia pada September 2011. Gubernur provinsi Riau Indonesia menyatakan keadaan darurat kabut tebal menyelimuti sebagian besar wilayahnya sehingga sejumlah sekolah dan bandara terpaksa ditutup. Lebih dari 22.000 orang terkena gangguan pernafasan dengan potensi bertambahnya angka, apabila angin membawa asap ke daerah yang lebih pada penduduk, seperti Kuala Lumpur atau Singapura. Pembukaan lahan untuk produksi kayu dan pertanian berkemungkinan menjadi penyebab dari keadaan ini. Menurut data dari *Global Forest Watch* suatu sistem online mutakhir yang melacak perubahan tutupan hutan, kebakaran, serta informasi lainnya secara seketika sekitar separuh dari kebakaran hutan ini terjadi pada lahan yang dikelola oleh Perusahaan Kelapa Sawit, HPH, dan HTI meskipun penggunaan api untuk membuka lahan sebenarnya melanggar hukum sekaligus membuktikan tidak menjalankannya program CSR dengan baik (www.wri.org , diposting pada 6 Maret 2014. Diakses pada 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB).

Terjadinya fenomena di atas terlihat bahwa memang pencemaran lingkungan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memang dilatar belakangi oleh kegiatan mereka dalam memanfaatkan alam, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Selanjutnya investor akan menilai perusahaan tidak mampu

mempertahankan keberlanjutan usahanya sehingga investor tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

Faktor *Size* perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, karena tidak semua perusahaan mempunyai biaya untuk melakukan tindakan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008:313)

Ukuran Perusahaan merupakan variable penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini jika dikaitkan dengan teori agensi, mengindikasikan bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Serimbing, 2005).

Di Indonesia sendiri penelitian tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial sudah banyak dilakukan. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Susilatri, Restu Agusti & Dedi Indriani (2011), Wirmie Eka Putra, Yuliusman dan Dedy Setiawan (2011), Muhammad Titan Terzaghi (2012), Agus Purwanto (2011), Dewi Yulfaida, Zhulaikha (2012).

Investor Asing lebih awal dalam mengenal CSR, sehingga investor asing memasukan kriteria sosial dalam setiap keputusan investasinya. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mewajibkan bagi semua perusahaan

Indonesia yang *go public* untuk melaksanakan CSR. Keseriusan Pemerintah Indonesia dapat dibukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, yang mewajibkan bagi seluruh perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan CSR. Di samping itu, bukti lain dukungan pemerintah agar perusahaan melaksanakan CSR adalah dengan adanya pengurangan pajak (*Tax Deductible*) terhadap Pendapatan kena pajak bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya sosial untuk beasiswa, magang, pelatihan. Biaya sosial dalam bentuk sumbangan, bantuan tidak dapat dikurangkan terhadap pendapatan kena pajak (Gunadi, 2007 dalam Ricky, Jesica, 2009)

Ketika seseorang akan menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan maka mereka harus terlebih dahulu melihat dan menganalisis seperti apa kondisi perusahaan tersebut, agar dapat diketahui apakah investasi yang dilakukan akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan atau tidak. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham perusahaan tetap diminati oleh investor. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balancesheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi), dan *cash flow statement* (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat *financial performance* tersebut (Fahmi,2011)

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
2. Bagaimana Kepemilikan Asing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
3. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
4. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
5. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 baik secara parsial maupun simultan.

6. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 baik secara parsial maupun secara simultan.
7. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
8. Seberapa Besar Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data untuk diolah dalam rangka penelitian sebagai syarat untuk menempuh sidang strata 1 di fakultas ekonomi universitas pasundan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
2. Untuk mengetahui Kepemilikan Asing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa

Efek Indonesia periode 2012-2014 baik secara Parsial maupun secara Simultan.

6. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 baik secara parsial maupun secara simultan.
7. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
8. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Manufaktur Subsektor logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan corporate social responsibility dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai ukuran perusahaan dan kepemilikan asing dengan pengungkapan *corporate social responsibility*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagian penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Peneliti dalam menyusun skripsi ini dilakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan manufaktur subsektor Logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id, perpustakaan lokal dan perpustakaan umum. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sejak bulan Mei 2016 hingga selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ukuran Perusahaan

2.1.1.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2010:4) menyatakan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“ Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Menurut Torang (2012:93) mendefinisikan ukuran perusahaan, yaitu:

“Ukuran organisasi adalah menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Riyanto (2008:313) menyatakan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Menurut Ball et al (1982) dalam Wirmie, Yulisuman, Dedy (2011) yaitu:

“Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai besaran atau suatu skala yang menunjukkan suatu usaha. Banyak penelitian yang merekomendasikan bahwa ukuran perusahaan diukur dengan total aset”.

Berdasarkan definisi di atas, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau aktiva dan berperan sebagai suatu variable konteks yang mengatur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

2.1.1.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2013 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2013 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

“Didalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah suatu produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Prasetyorini (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Menurut Kusumawardhani (2012), ukuran perusahaan yaitu:

“ indikator yang digunakan investor dalam menilai asset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (asset) dan total penjualan (net sales) yang dimiliki perusahaan.”

Menurut Restuwulan (2013), ukuran perusahaan yang sering digunakan untuk menentukan tingkat suatu perusahaan adalah:

1. “Tenaga Kerja
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu
2. Tingkat Penjualan
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun
3. Total Hutang Ditambah Dengan Nilai Pasar Saham Biasa
Merupakan jumlah hutang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu perusahaan atau suatu tanggal tertentu
4. Total Aset
Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.”

Menurut Welvin dan Herawaty (2010), ukuran perusahaan :

“Ukuran perusahaan dalam menggunakan proksi log natural dari total asset. Total asset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi.”

Harahap (2007:23) menyatakan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketetapan waktu”.

Dan menurut Sudirham (2011:85) Logaritma natural adalah logaritma dengan menggunakan basis bilangan e. bilangan e ini, seperti halnya bilangan π , adalah bilangan nyata dengan desimal tak terbatas. Natural log tersebut dapat dirumuskan dalam :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

2.1.2 Kepemilikan Asing.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Kepemilikan pada Perusahaan.

Menurut Yulius dan Yeterina (2013) Struktur Kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan, Tujuan Perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan, berikut merupakan struktur-struktur kepemilikan perusahaan:

1. Kepemilikan Pemerintah

Menurut Yulius dan Yeterina (2013) :

“kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah dari seluruh modal saham yang beredar”.

2. Kepemilikan Institusional

Menurut Yulius dan Yeterina (2013):

“kepemilikan institusional merupakan proporsi saham oleh institusi seperti LSM, Perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan”.

3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Yulius dan Yeterina (2013):

“ kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar”.

4. Kepemilikan Asing

Menurut Yulius dan Yeterina (2013) kepemilikan asing yaitu:

“Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri yang bukan berasal dari Indonesia”.

5. Kepemilikan Keluarga

Menurut Yulius dan Yeterina (2013) kepemilikan keluarga yaitu:

“Kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan maka bisa saja perusahaan tersebut termasuk dalam kepemilikan keluarga”.

2.1.2.2 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dijelaskan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Fauzi (2006) kepemilikan asing yaitu:

“Kepemilikan Asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing luar negeri baik individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia”.

Wang (2007); Manurung dkk (2008) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan saham asing yang berada dalam BUMN saat ini, yaitu modal asing yang dilakukan melalui portofolio. Keterlibatan pemodal asing dalam BUMN dapat membantu peningkatan keuntungan perusahaan dan menolong perusahaan yang dalam kondisi sulit.”

Menurut penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Machmud dan Chaerul (2006) Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya yang biasanya berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang.

Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak Asing diatas 50% dalam BUMN akan mengurangi campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam mengelola BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran terhadap manajemen.

2.1.2.3 Pengukuran Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Total saham asing yang dimaksud adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar

dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun (Susanti,2013).

2.1.3 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.1.3.1 Definisi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Sembiring (2005) menyatakan bahwa:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial atau yang sering disebut dengan *social disclosure, corporate social reporting, social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut memperluas tanggung jawab perusahaan, diluar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham”.

Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) yaitu :

“corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources”.

Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata *discretionary* yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hokum dan perundang-undangan seperti kewajiban membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan (Solihin, 2009).

Menurut Sudana (2011:10) *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut :

“Tanggung jawab social atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusab-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan”.

Sedangkan menurut Johnson and Johnson dalam Nur Hadi (2014:46) mendefinisikan *corporate social responsibility* adalah:

“*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business proceses to produce an overall positive impact on society*”.

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut Rudito dan Famiola (2013:1) adalah sebagai berikut:

“Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dan berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporate untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*). CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif”.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip pengungkapan CSR menurut Crowther David (2008) dalam Hadi (2014:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sebagai berikut:

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
2. *Accountability*, upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan pihak eksternal. Akuntabilitas perusahaan dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Nor Hadi (2009:60) menunjukkan bahwa tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholders* eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. *Transparancy*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transaksi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.”

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

dalam Isa Busyra (2011:60) merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi pengungkapan CSR yaitu sebagai berikut:

1. “Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di Negara tempat perusahaan beroperasi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek perdagangan.
4. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.

5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan insentif financial dan isu-isu lainnya.
6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik.
7. Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek system manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*discrimination*) dan indisipliner.
10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tidak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal”.

Di Indonesia di terapkan 5 (lima) prinsip utama yang biasa dikenal

dengan sebutan TARIF (Martina, Yenny, Rizky, 2013) yaitu:

1. *Transparancy* (Keterbukaan).
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*.
2. *Accountability* (Akuntabilitas).
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).
Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban perusahaan dengan pemegang saham.
4. *Independency* (Indepedensi).
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (Kewajaran).

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Suatu terobosan besar perkembangan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh John Elkington (1997) dalam Isa dan Busyra (2011:44) yang terkenal dengan “*The Triple Botton Line*”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu:

1. “*Profit* (Keuntungan)
Profit, merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, *profit* merupakan orientasi utama perusahaan. Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, meningkatkan tingkat kesejahteraan pemilik (*stakeholder*), peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumber dana, yang hal itu bisa dilakukan manakal didukung kemampuan menciptakan keuntungan (*profit*) perusahaan.
2. *People* (Masyarakat)
 Merupakan lingkungan masyarakat (*community*) dimana perusahaan berada. Mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, *community* memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Perusahaan tidak mungkin mampu menjalankan operasi tanpa didukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekati diri dengan masyarakat lewat strategi *social responsibility*.
3. *Planet* (Lingkungan)
 Merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikan terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas

keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat”.

Pada sisi lain Broadshaw dan Vogel (1981) dalam Isa dan Busyra (2008:46) menyatakan bahwa ada tiga dimensi dari ruang lingkup pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yaitu sebagai berikut:

1. “*Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate Responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan”.

2.1.3.4 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Kotler dan Lee (2005:8) manfaat pengungkapan *corporate social responsibility* adalah :

1. Meningkatkan penjualan dan *market share*.
2. Memperkuat *brand positioning*.
3. Meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan.
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan (retain) karyawan.
5. Menurunkan biaya operasional.
6. Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi”.

Menurut Untung (2008:6) manfaat *corporate social responsibility* bagi perusahaan adalah:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang usaha yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regular.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan”.

Selain itu juga Kartini (2014:83-88) menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam inisiatif CSR di era sekarang ini tidak akan sia-sia. Perusahaan akan mendapatkan *reward* berupa:

- “ 1. *Reward Financial*, yang terdiri dari:
- a. Menurunkan biaya operasional perusahaan
 - b. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
 - c. Menarik calon investor
 - d. Pertumbuhan nilai saham yang signifikan
 - e. Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik
 - f. Mencegah risiko dari dampak sosial
 - g. Mencegah risiko dari dampak alam.
2. *Reward Non Financial*, hasil *reward* ini tidak berbentuk uang tetapi berbentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas perusahaan tersebut secara kualitatif, dan tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Inti *reward* dari pelaksanaan CSR yang bersifat non finansial adalah **‘memperkuat reputasi perusahaan’**”.

2.1.3.5 Jenis-jenis Program Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dalam Isa dan Busyra (2011) bentuk Pengungkapan CSR dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu:

1. “Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, system komensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan karyawanya.
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam *program community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, dan lahan.
4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*)”.

2.1.3.6 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam melakukan pengungkapan CSR perusahaan bebas untuk menentukan format laporan yang akan dibuatnya. Namun yang terpenting adalah tidak adanya manipulasi seperti yang dilaporkan dalam laporan tersebut harus

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan pengungkapan informasi terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Yosefa Sayekti dan Wondabio, 2007).

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*). Yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Yosefa Sayekti dan Wondabio, 2007).

Kewajiban pengungkapan CSR juga diatur dalam undang-undang penanaman modal no. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian (b), pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur bahwa setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial (Yosefa Sayekti dan Wondabio, 2007)

Praktik Pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipandang sebagai wujud

akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan (Ghozali dan Chairi, 2007)

Corporate Social Responsibility terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan dalam penelitian ini mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan berdasarkan standar GRI (*Global Reporting Initiative*). *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).

Penelitian ini menggunakan 6 indikator pengungkapan yaitu : ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk. Indikator indikator yang terdapat di dalam GRI yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*)
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*human rights performance indicator*)
5. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*)
6. Indikator Kinerja Produk (*product responsibility performance indicator*)

Tabel 2. 1

Daftar Indikator Pengungkapan CSR

INDIKATOR KINERJA	
Indikator Kinerja Ekonomi	
Aspek : Kinerja Ekonomi	
EC 1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.

EC 2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
EC 3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
EC 4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
Aspek : Kehadiran Pasar	
EC 5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
EC 6	Kebijakan, praktek, dan proposi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
EC 7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC 8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natural, atau pro bono.
EC 9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
Indikator Kinerja Lingkungan	
Aspek Material	
EN 1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
EN 2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang
Aspek : Energi	
EN 3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer
EN 4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer
EN 5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi
EN 6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energy yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
EN 7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energy tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.
Aspek : Air	
EN 8	Total pengambilan air per sumber.
EN 9	Sumber air terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
EN 9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.
EN 10	Persentase total dan volume air yang digunakan kembali dan daur ulang
Aspek : Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)	
EN 11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam. Atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
EN 12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
EN 13	Perlindungan dan Pemulihan Habitat
EN 14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap

	keanekaragaman hayati
EN 15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.
Aspek : Emisi, Efluen dan Limbah	
EN 16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat
EN 17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
EN 19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substance/ODS) diperinci berdasarkan berat
EN 20	NOx, Sox dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat
EN 21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
EN 22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
EN 23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
EN 24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau dioalah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
EN 25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
Aspek : Produk dan Jasa	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut
EN 27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
Aspek : Kepatuhan	
EN 28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
Aspek : Pengangkutan/Transportasi	
EN 29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
Aspek : Menyeluruh	
EN 30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.
Indikator Kinerja Tenaga Kerja	
Aspek : Pekerjaan	
LA 1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah
LA 2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
LA 3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (ourna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
Aspek : Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen	
LA 4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut,
LA 5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk

	apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	
LA 6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA 7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
LA 9	Msalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan	
LA 10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
LA 11	Program untuk pengetahuan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier,
LA 12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja pengemangan karier secara teratur.
Aspek : Keberagaman dan Kesempatan Setara	
LA 13	Komposisi badan pengelola/penguaa dan perincian karyawan tiap kategori/klompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indicator lain.
LA 14	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.
Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia	
Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan	
HR 1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terjait dengan aspek Hak Asasi Manusia,
HR 2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek HAM
HR 3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan
Aspek : Nondiskriminasi	
HR 4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yan diambil/dilakukan.
Aspek : Kebebasan Berseikat dan Berunding Berkumpul	
HR 5	Segala kegiatan bersrikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek : Pekerja Anak	
HR 6	Kegiatan yang idetifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langah yang diambil untuk

	mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Aspek : Kerja Paksa dan Kerja Wajib	
HR 7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Aspek : Praktek/Tindakan Pegamanan	
HR 8	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.
Aspek : Hak Penduduk Asli	
HR 9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.
Indikator Kinerja Sosial	
Aspek : Komunitas	
SO 1	Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
Aspek : Korupsi	
SO 2	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
SO 3	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan prosedur antikorupsi
SO 4	Tindakan yang diambil dalam menangani kejadian korupsi.
Aspek : Kebijakan Publik	
SO 5	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
SO 6	Nilai kontribusi finansial dan natural kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan Negara di mana perusahaan beroperasi.
Aspek : Kelakuan Tidak Bersaing	
SO 7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
Aspek : Kepatuhan	
SO 8	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nononeter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
Indikator Kinerja Produk	
Aspek : Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	
PR 1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
PR 2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
Aspek : Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
PR 4	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.

PR 5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggaran termasuk hasil survey yang mengukur kepuasan pelanggan.
Aspek : Komunikasi Pemasaran	
PR 6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standard dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
PR 7	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
Aspek : Keluasan Pribadi (privacy) Pelanggan	
PR 8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilang data pelanggan.
Aspek : Kepatuhan	
PR 9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Untuk menghitung pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan pendekatan yang telah digunakan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Sukmawati Safitri Dewi dan Maswar Patuh Priyadi (2013), yaitu setiap item pengungkapan *corporate social responsibility* dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

$$CSRI_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

$CSRI_{ij}$ = Corporate Social Responsibility index perusahaan j tahun i

$\sum X_{ij}$ = Jumlah item diungkapkan perusahaan

N_j = Jumlah item perusahaan j, $N_j \leq 79$

2.1.3.7 Komponen Dasar Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

John Elkington (1997) yang dikutip oleh Hasibuan dan Sedyono (2006:73) menyebutkan bahwa Pengungkapan Corporate Social Responsibility dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu: people, profit, dan planet. Ketiga komponen inilah yang saat ini kerap dijadikan dasar perencanaan, pengungkapan dan evaluasi (pelaporan) program-program *Corporate Social Responsibility* yang kemudian dikenal sebagai triple bottom line.

Tabel 2.2

The Triple Bottom Line of Corporate Social Responsibility

	<i>People</i>	<i>Profit</i>	<i>Planet</i>
Definisi	Sebuah bisnis harus bertanggungjawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya.	Perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya.	Perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya alam dengan sangat bertanggungjawab dan menjaga keadaan lingkungan serta memperkecil jumlah limbah produksi.
Jenis kegiatan	Kegiatan kedermwanaan yang dilakukan secara tulus untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia.	Tindakan perusahaan untuk terjun langsung di dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi.	Penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggungjawab.
Contoh	-Basiswa Pendidikan -Pelayanan Kesehatan	-Pembinaan UKM -Bantuan modal dan kredit -Pemberdayaan tenaga lokal	-Pengelolaan limbah -Penanaman pohon -Kampanye lingkungan hidup

Sumber: Hasibuan dan Sedyono (2006:73)

2.1.3.8 Tujuan Perusahaan melakukan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Chuck Williams (2001:123) dalam Novi Resturiyani (2012) menyebutkan bahwa:

“Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.”

- 1). “Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
- 2). Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3). Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
- 4). Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

2.1.3.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Yusuf Wibisono (2007:7), implementasi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain;

1. “Komitmen Pimpinannya
Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharap akan memedulikan aktivitas sosial.
2. Ukuran dan Kematangan Sosial
Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi member kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan.
3. Regulasi dan Sistem Perpajakan yang diatur Pemerintah
Semakin amburadul regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Sedangkan menurut *princes of wales foundation* dalam Sukmadi (2010:138), ada 5 (lima) hal penting yang dapat mempegaruhi implementasi CSR, yaitu:

1. “Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good corporate governance*.
4. *Social cohesion*, yaitu dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strength*, atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi”.

Aktivitas CSR bagi perusahaan publik apabila dari investor global yang memiliki idealism tertentu, dengan aktivitas CSR, saham perusahaan dapat lebih bernilai. Invesrtor akan rela membayar mahal karena kita membicarakan tentang *sustainability* dan *acceptability* dalam bentuk premium niali saham tertentu. Itu sebabnya, ada pembahasan tentang CSR pada *annual report* karena investor ingin bersosial dengan membayar saham perusahaan secara premium. Jika perusahaan anda termsuk *high risk* investor akan menghindar. Dari uraian tersebut tampak bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen ;pimpinan perusahaan, ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah (Sukmadi, 2010:138).

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Definisi Kinerja

Menurut Irham Fahmi (2011:5) adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut Wibowo (2008) menyatakan bahwa definisi kinerja yaitu:

“Kinerja berasal dari pengertian performance. Adapun pengertian makna luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses kerja berlangsung”.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2001) dalam Irham Fahmi (2011:5)

bahwa:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi kegiatan/ program/ kebijaksanaan mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.”

2.1.4.2 Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Sutrisno (2009:53) tentang kinerja keuangan sebagai berikut:

“Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut“.

Menurut Irham Fahmi (2012:2) bahwa:

“Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan atura-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Menurut Lindrawati, Nita dan Budianto (2008) yaitu:

“Pengukuran kinerja adalah proses menentukan seberapa baik aktivitas bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan, strategi, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan”.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu

yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan, dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar serta mengacu pada standar yang digunakan.

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan.

Menurut Jumingan (2009:239) tujuan kinerja keuangan:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan. Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Menurut Kasmir (2012:196) mengenai hasil pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

“Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak”.

Selanjutnya Kasmir (2012:197) menjelaskan bahwa:

“Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen”.

Menurut Mulyadi (2001:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran”.

Menurut Mulyadi (2001:416) menyebutkan bahwa:

“Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu:

1. mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”

2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan.

Menurut Jones (2004:115) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu:

1. Risiko

Keuntungan atau *return* yang di dapat oleh investor tidak terlepas dari resiko yang melekat pada setiap perusahaan. Risiko adalah kemungkinan *realized return* suatu investasi akan berbeda dengan *expected return* investasi tersebut. *Realized return* adalah total penerimaan oleh sebuah saham yaitu semua penerimaan kas yang diterima ditambah dengan perubahan harga saham yang terjadi pada suatu periode tertentu yang diharapkan dapat diterima oleh investor.

2. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran Perusahaan adalah suatu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai alat bantu mengukur besar kecilnya perusahaan. Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan adalah total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, *value added*, kapitalisasi nilai pasar dan berbagai parameter lainnya.

Menurut Sri dan Rahmah (2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Kinerja Keuangan adalah :

1. Umur Perusahaan

Semakin besar umur suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga diharapkan perusahaan tersebut mampu mengantisipasi resiko yang

mungkin akan terjadi. Pengalaman perusahaan dalam mengolah perusahaannya tersebut tentu dapat berimbas pada laba yang dapat diperoleh perusahaan.

2. Ukuran perusahaan.

Seberapa besar perusahaan tersebut dilihat dari keseluruhan aktiva yang dimiliki. Semakin banyak aktiva yang dimiliki berarti ukuran perusahaan semakin besar dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan semakin besar karena perusahaan aktiva yang dimiliki tersebut dapat menunjang kelancaran perusahaan dan mengatasi kendala yang mungkin terjadi.

2.1.4.5 Tahap-Tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan.

Menurut Irham Fahmi (2012:3), ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis

kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan
Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:
 - a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai masalah yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap akhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.1.4.6 Pengukuran Kinerja Keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat pada analisis laporan keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Menurut Slamet Riyadi (2006:155) :

“Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada periode tertentu.”

Menurut Irham Fahmi (2012:15) Analisis Rasio tersebut yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1.“Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Meliputi *cash ratio*, *current ratio*, *acid test ratio* atau *quick ratio*.
2. Rasio Leverage, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Meliputi *debt to total asset ratio*, *debt to equity ratio* dan *time interest earned*.
3. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi

inventory turnover, receivable turnover, fixed assets turnover, dan other assets turnover.

4. Rasio Profitabilitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapat keuntungan. Meliputi *profit margin, Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Earning PerShare (EPS).*”

a. *Return On Investment (ROI)*

Pengertian ROI menurut Munawir (2002:89) adalah:

“Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dan untuk menghasilkan keuntungan.”

Sedangkan menurut Kasmir (2011:202) yaitu:

“*Return On Investment (ROI)* merupakan salah satu rasio dari rasio profitabilitas dimana rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan.”

b. *Return On Asset (ROA)*

Menurut Kasmir (2012:201)

“*Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan.”

Standar industri rasio ini menurut Kasmir adalah sebesar 30% .

sehingga secara matematis return on asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Profit After Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Menurut Selamat Riyadi (2009:159)

“Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank,

rasio ini mengukur tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga semakin tinggi tingkat ROA menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.”

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) yaitu:

“ROA adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas asset yang dimiliki perusahaan. ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.”

c. *Return On Equity (ROE)*

Menurut Kasmir (2012:204) adalah:

“Hasil pengembalian atas equitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.”

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

Menurut Jumingan (2011:245) yaitu:

“Return On Equity dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mrnghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri.”

d. *Earning Per Share (EPS)*

Menurut Zulia Hanum (2009) :

“Rasio Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan dari setiap lembar saham biasa.”

Sedangkan menurut Fahmi (2012:97) Earning Per Share adalah:

“Earning Per Share adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya.”

Menurut Samsul (2006:167) yaitu:

“Membeli saham berarti membeli prospek perusahaan, yang tercermin dalam laba persaham maka prospek perusahaan, sementara jika laba per saham lebih rendah berarti kurang baik, dan jika laba per saham negatif berarti tidak baik.”

2.2 Kerangka Pemikiran.

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Ukuran perusahaan merupakan variable penduga yang banyak digunakan untuk menjalankan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini jika dikaitkan dengan teori agensi, mengindikasikan bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Selain itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Serimbing 2005)

Menurut Putra (2011) dalam Kurnianingsih (2013) secara teoritis perusahaan besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyaak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki *shareholder* yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya.

Dalam Brigham dan Houston yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2006:20), perusahaan yang keuntungannya diatas rata-rata dapat melakukan tanggung jawab sosial. Banyak perusahaan besar yang melakukan sejumlah besar proyek masyarakat dan program kesejahteraan karyawan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial dari pada perusahaan yang mempunyai skala kecil (Sembiring 2005)

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Puspitasari (2009), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui,

Negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Fauzi, 2006).

2.2.3 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan.

CSR atau tanggung jawab perusahaan merupakan masalah yang sangat penting untuk kegiatan ekonomi karena memperhatikan semua aspek dari aktivitas ekonomi perusahaan dan hubungan dengan *stakeholders* (Geovanni Fiori et al., 2007 dalam Feb Tri Wijayanti, 2011). Chung et al. (2008), beranggapan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih banyak maka kinerja keuangan perusahaan cenderung akan meningkat (dalam Feb Tri Wijayanti;2011).

Menurut Nor Hadi (2011:128), *social responsibility* merupakan sarana untuk mengurangi berbagai risiko dan complain yang muncul dari iligitimasi masyarakat (*stakeholder*) yang dapat mengganggu profitabilitas dan going concern perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholder-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor.

Tsoutsoura (2004) dalam Ahmad Husnan (2013) dan Silvia (2014), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang solid maka

perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam domain kinerja sosial. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain informasi keuangan yang diwajibkan, perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela.

2.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dalam peningkatan kinerja keuangan. Hesti (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sri Wijayati (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar *asset* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan perusahaan (Lusi, Extaliyus 2013).

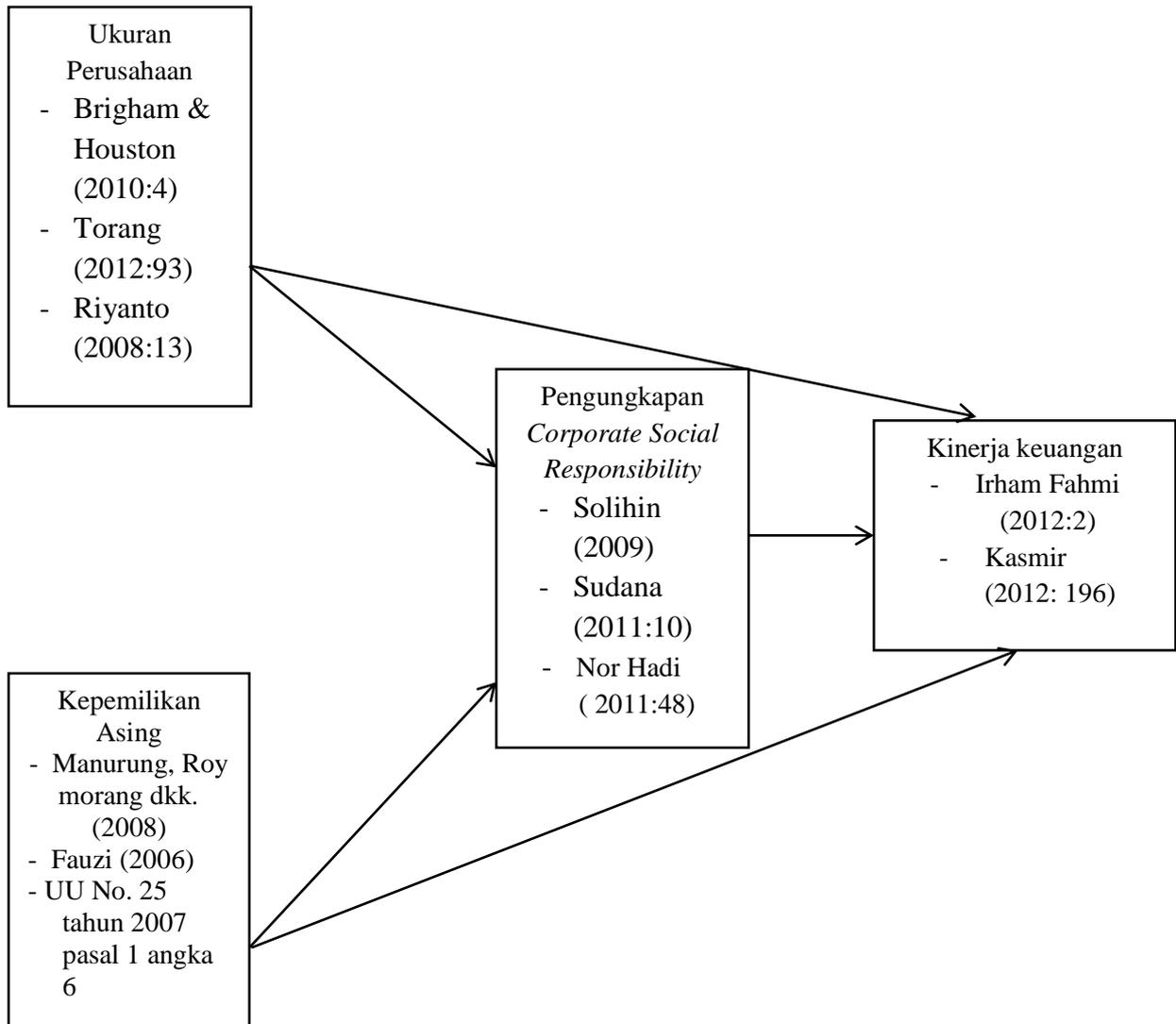
Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan kondisi keuangan yang baik tidak serta merta dapat

dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua lini perusahaan. (Lusi Extaliyus 2013).

2.2.5 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Keuangan.

Keterlibatan pemodal asing dapat membantu peningkatan keuntungan perusahaan dan menolong perusahaan dalam kondisi sulit. Hal ini disebabkan karena pemodal asing dianggap mampu dan berani menyuarakan kepentingan pemodal secara luas, jika terdapat kebijakan manajemen perusahaan yang merugikan. Selain itu investor asing juga melaksanakan pengawasan secara aktif dalam memantau perkembangan perusahaan melalui status perusahaan, serta melakukan konfirmasi melalui telepon atas suatu *corporate actions* yang dilakukan perusahaan tersebut (Wang, 2007; Manurung, dkk 2008).

Kepemilikan saham oleh pihak asing diatas 50% dalam BUMN akan mengurangi campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam mengelola BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran terhadap manajemen. Hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi kinerja perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).



2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Berikut ini adalah penelitian terdahulu:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wirmie Eka Putra, Yuliusman, dan Dedy Setiawan (2011)	Pengaruh <i>Size</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Dalam Negeri dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan.	Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa ukuran perusahaan (<i>size</i>), profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Dalam Negeri dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.	1. <i>Size</i> , dan Kepemilikan Asing sebagai variable independen, variable dependen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.	1. Tiga variable independen yaitu Profitabilitas, Kepemilikan dalam negeri dan <i>Leverage</i> . 2. Jumlah sample, periode penelitian dan metode penelitiann <i>stratified random sampling</i>
2	Eddy Rismanda Sembiring (2005)	Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab sosial Studi empiris pada	Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa ukuran perusahaan (<i>size</i>), <i>profile</i>	1. Ukuran perusahaan sebagai variabel independen, variabel	1. Dua variable independen yaitu <i>profile</i> dan ukuran dewan komisari,

		Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek	dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.	dependen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	dan <i>Leverage</i> . 2. Jumlah sample, periode penelitian dan metode penelitian <i>stratified random sampling</i> .
3	Evi Mutia, Zuraida dan Devi Andriani (2011)	Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil pengujian hipotesis menyatakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap CSR	1. Ukuran perusahaan sebagai variable independen dan variable dependen CSR	1. Profitabilitas dan ukuran dewan komisaris sebagai variable independen. 2. Jumlah sample dan periode penelitian.
4	Sasi Ika Mawandira (2014)	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	Hasil pengujian hipotesis menyatakan adanya hubungan secara simultan antara variable independen dengan variable dependen.	Ukuran perusahaan sebagai variable independen. Variable dependen pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> .	1. Tiga variable independen likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. 2. Jumlah sample, periode dan metode penelitian <i>stratified random sampling</i> .

5	Rita Yuliana, Bambang Purnomosidhi, dan Eko Ganis Sukoharsono (2008)	Pengaruh karkteristik perusahaan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> dan dampaknya terhadap reaksi investor	Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa <i>profile</i> , konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat keluasan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat keluasan CSR.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran jumlah sample dan perusahaan periode penelitian. 2. Variable independen pengungkapan csr. 3. Metode <i>Purposive sampling</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas, <i>profile</i> , ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan publik sebagai variable independen. 2. Variable dependen abnormsl return dan volume perdagangan sebagai variable intervening.
---	--	--	---	--	--

Sumber: Data yang diolah kembali oleh penulis, 2016

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

H_2 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

H_3 : Ukuran perusahaan dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

H_4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_5 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_6 : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_7 : Ukuran perusahaan, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara simultan.

H_8 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan berdampak terhadap Kinerja Keuangan.

H_9 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan berdampak terhadap Kinerja Keuangan.